

STRATEGI PENGELOLAAN ASET TETAP DI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR

Andi Reskia Nurhidayah Abbas¹, Decky Dwi Utomo¹, Ardieansyah¹, Elvira Mulya Nalien¹

¹Fakultas Manajemen Pemerintahan, Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumatera Barat

Artikel Info

Riwayat Artikel:

Tanggal Dikirim: 14 Mei 2025

Tanggal Diterima: 26 Mei 2025

Tanggal Dipublish: 28 Juni 2025

Kata Kunci: Strategi, Aset Tetap, Pengelolaan Aset Tetap

Penulis Korespondensi:

Andi Reskia Nurhidayah Abbas

Email :

andireskianurhidayah@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Aset tetap merupakan elemen penting dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Aset tetap memerlukan strategi pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menunjang optimalisasi kinerja dan menjamin kelangsungan peran dan fungsi pemerintah untuk pelayanan publik yang lebih optimal.

Tujuan: untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Metode: Metode yang digunakan dalam pelaporan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan aparatur kecamatan dan masyarakat, serta studi dokumen.

Hasil dan Pembahasan: strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yaitu pengangkatan pengurus barang, konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan, pembinaan teknis, sosialisasi pengelolaan aset tetap, pelaksanaan Sensus Barang berbasis *E-System*, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Kesimpulan: strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar terbagi atas enam, yaitu pengangkatan pengurus barang, konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan, pembinaan teknis, sosialisasi pengelolaan aset tetap, pelaksanaan Sensus Barang berbasis *E-System*, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa kendala seperti, keterbatasan sumber daya manusia, keberadaan aset lama, dan kurangnya pembaruan data dan perubahan fisik aset.

Jurnal Mutiara Manajemen

E.ISSN: 2579-759X

Vol. 10 No. 1 Juni 2025 (P 19-24)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMM>

DOI: <https://doi.org/10.51544/jmm.v10i1.5879>

How To Cite: Abbas, Andi Reskia Nurhidayah, Decky Dwi Utomo, Ardieansyah, and Elvira Mulya Nalien. 2025. "Strategi Pengelolaan Aset Tetap Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar." *Jurnal Mutiara Manajemen* 10 (1): 19–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jmm.v10i1.5879>



Copyright © 2025 by the Authors, Published by Program Studi: Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)).

1. Pendahuluan

Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Menurut Ratno (2020), salah satu di antara kewajiban yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki seperti pengeluaran belanja dalam bentuk aset tetap. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Purwanti (2018) bahwa pelayanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya keuangan.

Aset tetap merupakan suatu elemen penting dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Penyajian aset tetap pada instansi pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan pada PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual. Aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap memerlukan strategi pengelolaan untuk menghadapi berbagai tantangan. Aset tetap ini perlu dikelola dengan efektif untuk menunjang optimalisasi kinerja dan menjamin kelangsungan peran dan fungsi pemerintah untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Pengelolaan aset tetap juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menciptakan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Umar, 2018).

Selain itu, strategi pengelolaan aset tetap harus dilakukan dengan efisien dan terstruktur karena dalam praktiknya, pengelolaan aset belum terlaksana sebagaimana mestinya. Masih banyak tantangan dan kendala yang ditemukan dalam pengelolaannya, seperti aset tetap yang tidak terawat karena kurangnya komitmen pimpinan dalam perbaikan pengelolaan aset tetap, kurangnya kompetensi SDM sebagai pengelola aset tetap, kurangnya komunikasi dan koordinasi partner kerja, perubahan kebijakan pengelolaan aset tetap, hingga kurangnya sarana prasarana pengelola aset tetap (Purwanti, 2018). Apabila strategi pengelolaan aset tetap dilakukan dengan efisien dan terstruktur, khususnya pada tahapan penggunaan, pemeliharaan, pembinaan, dan pengawasan, maka dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Menurut Wartuny (2020), aset perlu dirawat dengan baik agar nilainya tidak semakin menurun dengan cara memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus disertai kelengkapan dokumen yang menjadi dasar pengelolaan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila suatu aset tidak berkontribusi dalam pemberian pelayanan secara efektif, maka aset tersebut tidak seharusnya digunakan ataupun dimiliki oleh suatu sektor publik (State of Victoria, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan, menggambarkan, dan mendeskripsikan secara sistematis fakta yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2017). Tujuannya adalah mengungkapkan data secara deskriptif berupa data verbal sesuai dengan potret apa adanya terkait hal yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi dan wawancara. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil

wawancara peneliti dengan Ibu Faridawati, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kantor Camat Panakkukang, Kota Makassar. Sementara data sekunder berupa dokumen tentang pengelolaan aset tetap di Kantor Camat Panakkukang, Kota Makassar.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kantor Camat Panakkukang, Kota Makassar mengenai strategi pengelolaan aset tetap yang harus di laksanakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman barang milik daerah.

Pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan sesuai regulasi. Aset yang dikelola meliputi aset yang dimiliki oleh Kecamatan Panakkukang sendiri, serta aset yang berada di bawah tanggung jawab sebelas Kelurahan. Untuk memastikan pengelolaan berjalan efektif, terdapat beberapa strategi yang dilakukan yaitu:

1. Pengangkatan Pengurus Barang

Pengangkatan pengurus barang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 3311/188.4.45/Tahun 2024. Penunjukan ini menjadi dasar hukum bagi pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Setiap aset yang ada diinventarisasi dan dicatat dengan rinci, mulai dari kategori tanah, bangunan, peralatan, hingga kendaraan. Pengurus Barang bertanggung jawab menjaga, memelihara, serta memastikan bahwa setiap aset digunakan sesuai peruntukannya. Dengan adanya dua tingkatan pengelolaan, yaitu di Kecamatan dan Kelurahan, maka koordinasi antar unit menjadi sangat penting untuk menjaga keakuratan dan konsistensi data aset.

2. Konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan

Laporan perkembangan aset harus disusun secara periodik, meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Setiap laporan harus mencakup data yang lengkap mengenai aset dalam klasifikasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A hingga E, sehingga memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi dan status aset. Tidak hanya menggunakan metode manual, Kecamatan Panakkukang juga mulai menerapkan pelaporan berbasis sistem elektronik atau E-System.

Hal ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan efisiensi, meminimalisir kesalahan input data, dan mempercepat proses rekapitulasi. Melalui strategi pelaporan berlapis ini, Kecamatan berupaya untuk menjaga aset tetap dalam kondisi terpantau dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus memudahkan pengawasan dari pihak terkait.

Dokumen yang mendukung strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang antara lain adalah Kartu Inventaris Barang (KIB) A untuk tanah, KIB B untuk peralatan dan mesin, KIB C untuk gedung dan bangunan, KIB D untuk jalan, irigasi, dan jaringan, serta KIB E untuk aset tetap lainnya. Selain itu, setiap semester dan tahun, Kecamatan dan Kelurahan diwajibkan menyusun Laporan Perkembangan Aset Tetap.

Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai alat kontrol, dasar evaluasi, serta bukti administratif yang penting dalam audit. Dengan keberadaan dokumen yang lengkap dan teratur, pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sekaligus mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Pembinaan Teknis

Pembinaan ini menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pengelolaan aset tetap. Di Kecamatan Panakkukang, pembinaan dilakukan secara rutin oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota. Bentuk pembinaan meliputi pelatihan teknis, workshop, serta penyelenggaraan rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh Pengurus Barang dari Kecamatan dan Kelurahan.

Melalui pembinaan ini, para Pengurus Barang mendapatkan pemahaman terbaru mengenai kebijakan aset, teknik pencatatan, penggunaan sistem elektronik, serta prosedur sensus barang. Selain itu, rapat koordinasi menjadi wadah untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan dan mencari solusi bersama. Meskipun demikian, sistem pembinaan ini belum sepenuhnya menerapkan reward and punishment. Artinya, belum ada penghargaan resmi bagi pengurus yang berkinerja baik, ataupun sanksi administratif bagi yang kurang optimal dalam tugasnya.

4. Sosialisasi Pengelolaan Aset Tetap

Sosialisasi dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk menjaga keterpaduan pemahaman antar semua pihak yang terlibat. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh BPKAD dan melibatkan seluruh Pengurus Barang di Kecamatan dan Kelurahan. Dalam sosialisasi tersebut, dibahas berbagai topik mulai dari pembaruan sistem, perubahan regulasi, hingga metode pendataan terbaru.

Sosialisasi pengelolaan aset tetap dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk menjaga keterpaduan pemahaman antar semua pihak yang terlibat. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh BPKAD dan melibatkan seluruh Pengurus Barang di Kecamatan dan Kelurahan. Dalam sosialisasi tersebut, dibahas berbagai topik mulai dari pembaruan sistem, perubahan regulasi, hingga metode pendataan terbaru.

Sosialisasi ini penting karena mengingat dinamika perubahan kebijakan yang cepat, terutama terkait dengan pengelolaan berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk menyamakan persepsi antar pengurus barang, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi perbedaan interpretasi yang dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset.

5. Pelaksanaan Sensus Barang berbasis *E-System*

Kebijakan ini merupakan respon terhadap kebutuhan digitalisasi administrasi pemerintahan, sekaligus untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pencatatan aset. Melalui E-System, proses sensus dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mudah dipantau. Sistem ini memungkinkan penginputan data secara langsung ke server, sehingga memperkecil potensi kehilangan atau manipulasi data. Dengan adanya kebijakan ini, Kecamatan Panakkukang berharap dapat meningkatkan kualitas manajemen aset serta memudahkan proses audit internal maupun eksternal.

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengadaan komputer di setiap Kelurahan. Komputer ini dikhawasukan untuk penggunaan Pengurus Barang dalam rangka input dan pengelolaan data aset. Peningkatan sarana ini tidak hanya bertujuan untuk memperlancar tugas administratif, tetapi juga untuk memastikan kesiapan kelurahan dalam mengadopsi sistem pelaporan berbasis digital. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan tingkat kesalahan manual dapat dikurangi dan efektivitas kerja dapat meningkat, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih profesional.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Walaupun telah banyak dilakukan upaya perbaikan, pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan aset. Beberapa Kelurahan masih mengalami kekurangan ASN, sehingga Kepala Seksi harus merangkap sebagai Pengurus Barang. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pengelolaan, karena tanggung jawab menjadi bertambah berat.

2. Keberadaan Aset Lama

Kendala yang masih sering ditemukan dalam pengelolaan aset tetap salah satunya keberadaan aset lama yang tidak lagi diketahui secara pasti. Aset-aset ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses sensus dan pelaporan, karena memerlukan upaya tambahan untuk penelusuran dan verifikasi data.

3. Kurangnya Pembaruan Data dan Perubahan Fisik Aset

Hal tersebut juga menjadi suatu kendala dalam pengelolaan aset tetap karena tanpa pelaporan resmi juga menjadi hambatan dalam menciptakan data aset yang akurat dan *up-to-date*.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan aset tetap di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar terbagi atas enam, yaitu pengangkatan pengurus barang, konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan, pembinaan teknis, sosialisasi pengelolaan aset tetap, pelaksanaan Sensus Barang berbasis *E-System*, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa kendala seperti, keterbatasan sumber daya manusia, keberadaan aset lama, dan kurangnya pembaruan data dan perubahan fisik aset.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhajar Diantoro selaku Plt Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bapak Dr. H. Lalu Satria Utama, S.STP, M.AP selaku Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan program magang, Bapak Decky Dwi Utomo,S.STP.MM selaku Dosen Pembimbing Program Studi Keuangan Publik IPDN yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan selama masa magang dan Orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.

6. Daftar Pustaka

- Purwanti, N. Y. (2018). "Strategi Pengelolaan Aset Tetap di Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon". *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. 10(1), 58-66.
- Ratno, F. A. (2020). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Solo Raya". *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 6(4), 362-376.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- State of Victoria. (2016). "Asset Management Accountability Framework". Melbourne: Department of Treasury and Finance.

- Umar, H. (2018). “The Influence of Internal Control and Competence of Human Resources on Village Fund management and The Implactions on The Quality of Village Financial Reports”. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7).
- Wartuny, S. (2020). “Analisis Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal*, 1(1), 22-33.